

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
DI SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Teknik



Oleh :

TOMI VIKTORIA

NIM. 08518244014

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "**Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Di SMK Muhammadiyah Prambanan**" ini disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan di depan dewan penguji tugas akhir skripsi program studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, April 2014

Dosen Pembimbing



Soeharto, Ed.D.

NIP.19530825 1979 03 1003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tomi Viktoria

NIM : 08518244014

Prodi : Pendidikan Teknik Mekatronika-S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, Mei 2014

Yang menyatakan,


Tomi Viktoria

NIM. 08518244014

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan**" ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 30 Mei 2013 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Soeharto, Ed.D	Ketua Penguji	
Herlambang Sigit P, M.Cs	Sekretaris Penguji	
K. Ima Ismara, M.Pd, M.Kes	Penguji Utama	

Yogyakarta , 2012
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta



Dekan,
Dr. Moch. Bruri Triyono, M.Pd

NIP. 19560216 198603 1 003 ↵

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN**

DI SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN

Oleh:

Tomi Viktoria

NIM.08518244014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan, (2) mengetahui akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan, (3) mengetahui pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan yang berjumlah 10 responden. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode angket dan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan menunjukkan bahwa : (1) SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup dengan skor 75,5% dalam melaksanakan kebijakan yang transparan, (2) SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup dengan skor 80,6% dalam melaksanakan kebijakan yang akuntabel, (3) pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan tergolong cukup dengan skor 78,6%.

Kata kunci : transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana pendidikan

MOTTO

❖ *Jalan lapang menuju kesuksesan adalah BEKERJA, BERUSAHA dan BERDO'A. Sedangkan modal utama kesuksesan adalah PANTANG MENYERAH, BERANI MENGAMBIL KEPUTUSAN dan TIDAK TAKUTAKAN KEGAGALAN.*

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan...

Untukmu...

*Ayah dan Ibunda tercinta...yang selalu mengasihi dan menyanyangiku
dan untukmu...Kakak dan Adikku (villa dan M.Khoirul)...sebagai pemompa
semangat*

Kuberdoa semoga semuanya selalu dalam lindungan-Nya

Saudara & Sahabat, Teman-teman MEKATRONIKA 08 FT UNY

Terimakasih atas dukungan dan semangatnya

Bersama kalian hidup ini semakin bermakna dan berwarna.....

*Saudara & Sahabat, Teman-teman ku semua
yang telah membuat hidup ini menjadi lebih indah.*

*Semoga sebagian kecil yang telah terselesaikan ini
Dapat menjadi awal pekerjaan besar yang telah menanti kita.....*

KATA PENGANTAR



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Nikmat, Karunia dan Rahmat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan**. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis mengucapkan dan mengapresiasi atas dukungan dan bimbingan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Berdasar kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Soeharto, Ed,D, selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing atas segala arahan dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ketut Ima Ismara, M.Pd, M.Kes, Dr. Mujiyono, S.T., M.T., W.Eng selaku validator instrumen penelitian.
3. Bapak Drs. Ketut Ima Ismara, M.Pd, M.Kes, selaku ketua jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNY.
4. Bapak Dr. Moch Bruri Triyono, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Anton Subiyantor, M.M, selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan.
6. Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan
7. Teman-teman Pendidikan Teknik Mekatronika 2008 FT UNY
8. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. oleh karenanya, masukan berupa kritik maupn saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk dapat digunakan pada waktu yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membaca karya ini.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, Mei 2014

Penulis

Tomi viktorina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PERSETUJUAN ..	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	6
1. Biaya Pendidikan	6
2. Pengelolaan Dana Pendidikan	8

3. Transparansi	14
4. Akuntabilitas	16
B. Penelitian yang Relevan	19
C. Kerangka Berfikir	21
D. Pertanyaan Penelitian	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
C. Subjek Penelitian.....	23
D. Definisi Operasional.....	23
E. Metode Pengumpulan Data	24
F. Instrumen Penelitian	26
1. Instrumen Transparansi	26
2. Instrumen Akuntabilitas	37
3. Instrumen Pengelolaan Dana Pendidikan	28
4. Pedoman Wawancara	30
G. Validitas Instrumen	31
1. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	34
B. Hasil Penelitian	34
1. Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan	34
2. Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan	37
3. Pengelolaan Dana Pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan	41
C. Pembahasan	45
1. Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan	45
2. Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan	47
3. Pengelolaan Dana Pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	52
B. Implikasi Penelitian.....	52
C. Keterbatasan Penelitian	53
D. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kisi-Kisi Instrumen Transparansi.....	27
Tabel 2	Kisi-Kisi Instrumen Akuntabilitas.....	28
Tabel 3	Kisi-Kisi Instrumen Pengelolaan Dana Pendidikan	29
Tabel 4	Pedoman Wawancara.....	30
Tabel 5	Distribusi Kategori Data	33
Tabel 6	Rangkuman Distribusi Kriteria Transparansi	35
Tabel 7	Rangkuman Distribusi Kriteria Akuntabilitas.....	38
Tabel 8	Rangkuman Distribusi Kriteria Pengelolaan Dana Pendidikan.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Kurva Kategori Data.....	32
Gambar 2.Persentase Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan.....	36
Gambar 3.Persentase Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan.....	39
Gambar 4.Persentase Pengelolaan Dana Pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen
- Lampiran 2 Instrumen Penelitian
- Lampiran 3 Validasi Instrumen
- Lampiran 4 Data Hasil Penelitian
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Perhitungan Kecenderungan Variabel Data
- Lampiran 7 Perhitungan Data Penelitian
- Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan menjadi acuan penjaminan mutu untuk komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan tersebut salah satunya adalah tentang standar pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut harus mendapatkan penekanan dan perhatian oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Tujuannya adalah agar sistem pendidikan yang ada berjalan dengan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Namun pada kenyataannya, saat ini masih belum semua lembaga pendidikan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Seperti yang ditulis dalam *kompas.com* (2010) penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 3.600 orang tua siswa dari 720 sekolah di sejumlah tanah air, hasilnya adalah 71,61 persen orang tua tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58 persen orang tua tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS dan memberikan saran kepada sekolah. Tidak hanya itu saja, seperti yang dituliskan dalam *harian Merdeka.com* (2013) Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Komunitas orang tua siswa, menyatakan 87 persen

sekolah tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jumlah tersebut merupakan hasil uji akses yang dilakukan terhadap 222 sekolah sample di delapan provinsi.

Dari data dan berita yang ada pengelolaan dana pendidikan dinilai masih menjadi permasalahan yang besar. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan masih cukup rendah. Selain hal tersebut dikarenakan pihak sekolah dirasa kurang transparan dan akuntabel dalam memberikan data dan informasi yang dikelola kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*).

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 pasal 2 telah dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik. Artinya sekolah memberikan hak dan kemudahan akses kepada semua pihak yang berkepentingan dan terkait (*stakeholder*) untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait (*stakeholders*). Sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan pihak yang terkait (*stakeholders*) adalah bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Sekolah yang bersih dan berwibawa artinya sekolah tersebut tidak KKN dan profesional. Pengelolaan dana merupakan pokok penting yang berkaitan dengan

profesionalitas sekolah. Oleh karena itu sekolah harus melibatkan semua komponen pendidikan yang ada, baik itu komite dan pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan (*stakeholders*).

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan di atas dapat diidentifikasi masalahnya bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan. Kurangnya perhatian dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dinilai rendah. Adapun beberapa faktor yang berhubungan dengan kendala dan kekurangan dalam pengelolaan dana pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana pendidikan dimungkinkan tidak transparan.
2. Akuntabilitas dana pendidikan dimungkinkan tidak transparan.
3. Kewenangan pengelolaan yang tidak jelas, apakah kewenangan sepenuhnya berada pada yayasan atau kepala sekolah.
4. Pengambilan atau pungutan dana masyarakat tidak jelas.
5. Realisasi dana pendidikan yang berasal dari pemerintah kabupaten yang tidak jelas.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas dan berdasarkan keterbatasan waktu, kemampuan biaya, kemampuan penulis, dan kesempatan, maka masalah penelitian dibatasi pada proses pelaksanaan kegiatan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah transparansi di SMK Muhammadiyah Prambanan?
2. Bagaimanakah akuntabilitas di SMK Muhammadiyah Prambanan?
3. Bagaimanakah pengelolaan dana pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui transparansi di SMK Muhammadiyah Prambanan.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas di SMK Muhammadiyah Prambanan.
3. Untuk mengetahui pengelolaan dana pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi dalam menerapkan proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan wujud pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada di perguruan tinggi.

b. SMK Muhammadiyah Prambanan

Dapat membantu pihak SMK Muhammadiyah Prambanan dalam pertimbangan pelaksanaan proses pengelolaan dana pendidikan guna terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

c. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa program studi pendidikan teknik mekatronika maupun mahasiswa yang lainnya.

d. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian referensi untuk penelitian yang relevan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Biaya Pendidikan

Biaya (*cost*) merupakan istilah yang secara umum berkaitan erat dengan administrasi keuangan. Biaya (*cost*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) telah diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan sesuatu. Mulyono dalam Mei Hidayati (2012) mendefinisikan biaya sebagai sebagai jumlah uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen.

Istilah biaya (*cost*) secara luas telah dikemukakan oleh Bowen (1980:1) dan Jones (1985:5) yang dikutip oleh Cepi Safruddin (2009), yaitu "*payment made to acquire goods and service*" dan "*that which must be given up in order to gain something else*". Jadi, biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Berkaitan dengan pendidikan, biaya (*cost*) dapat dijelaskan sebagai suatu besaran nilai dana yang perlu disediakan dan digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan komponen yang dianggap penting dalam menunjang proses keberlangsungan kegiatan pendidikan. Anggapan penting tersebut terkait dengan kegiatan pendidikan di sekolah seperti kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan dan kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut

tentunya selalu membutuhkan biaya dalam proses keberlangsungannya, agar kegiatan-kegiatan tersebut tercapai secara optimal.

Nanang Fattah (2009:23) memberikan penjelasan mengenai biaya dalam pendidikan yang dikutip dari Cohn (1979); Thomas Jone (1985), Alan Thomas (1976), bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan digolongkan dalam 3 jenis seperti yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 pasal 3, yaitu:

- a. Biaya satuan pendidikan, merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- c. Biaya pribadi peserta didik, merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya satuan pendidikan yang dimaksudkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008) yaitu:

a. Biaya investasi, yang terdiri atas:

1. Biaya investasi lahan pendidikan.
2. Biaya investasi selain lahan pendidikan.

b. Biaya operasi, yang terdiri atas:

1. Biaya personalia.

Biaya yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.

2. Biaya nonpersonalia.

Biaya yang meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

d. Beasiswa yaitu bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

2. Pengelolaan Dana Pendidikan

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Istilah pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan

oleh Husaini Usman (2004:3) dalam Mei Hidayati (2012) yang mengandung makna *to control*/yang artinya mengatur dan mengurus.

Secara luas, dana merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan ilmu akuntansi dan uang. Dana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Berkaitan dengan pendidikan dana berarti uang yang disediakan untuk kegiatan atau keperluan pendidikan. Lebih lanjut penjelasan mengenai dana pendidikan telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 1 bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola sekolah.

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari konsep majaemen keuangan sekolah yang harus direncanakan dan diatur dengan baik dan benar. Perencanaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah dalam menyusun dan merumuskan pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Mulyono (2010) dalam Mei Hidayati (2012) mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak lepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.

Penyusunan dan perumusan anggaran maupun dana pendidikan disekolah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan yang ada. Hal tersebut terkait dengan darimana sumber keuangan berasal dan penggunaan keuangan atau pengeluaran keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Suryana (2008) dalam Sutedjo (2009) sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
- c. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya.
- d. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan antara lain:

- a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

- b. Prinsip efisiensi

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

- c. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi atas kapatutan dan tat kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini

audit wajar tanpa perkecualian; serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

d. Prinsip akuntabilitas publik

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketersedian dan penggunaan dana pendidikan adalah bagian terpenting dalam pengelolaan dana pendidikan. Penggunaan dana pendidikan harus tepat sasaran, sehingga penggunaan dana pendidikan yang ada akan efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan dan pencapaian pendidikan akan terwujud sebagaimana mestinya.

Mulyono (2010) dalam Mei Hidayati (2012) telah mengemukakan tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah, antara lain:

- a. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
- b. Memelihara barang-barang (aset) sekolah.
- c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Prinsip dan tujuan pengelolaan dana pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ada. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya alat ukur dan standarisasi yang mengatur tentang pengelolaan dana pendidikan. Berikut ini alat ukur dan

standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dana pendidikan (BAN-SM, 2009):

1. Biaya pendapatan, antara lain:
 - a. Anggaran pemerintah, yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/Kota, sumber anggaran pemerintah lainnya.
 - b. Dana masyarakat, yang berasal dari biaya pendidikan siswa (SPP), biaya pendaftaran, sumbangan orang tua siswa, sumber dan masyarakat lainnya.
 - c. Donasi, yang berasal dari yayasan, hibah (*block grant*), dan sumber donasi lainnya.
 - d. Pendapatan lain, yang berasal dari penjualan hasil produksi, sumber pendapatan lainnya.
2. Biaya pengeluaran, antara lain:
 - a. Langsung pada program keahlian, yaitu: gaji dan tunjangan guru, gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, biaya pengembangan guru dan tenaga kependidikan, kegiatan pembelajaran, kegiatan kesiswaan, alat tulis program keahlian, bahan habis pakai, alat habis pakai, kegiatan rapat, transport dan perjalanan dinas, pengadaan soal-soal ulangan/ujian, daya dan jasa, dan lain-lain.
 - b. Tidak langsung pada program keahlian, yaitu: investasi untuk program-program keahlian, dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain
3. Biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Anggaran untuk kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.

5. Biaya operasional untuk guru pada tahun berjalan.
6. Biaya operasional untuk tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
7. Alokasi biaya operasional program keahlian di luar pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Alokasi biaya kegiatan prakerin, uji kompetensi, bimbingan karir, dan program kewirausahaan.
9. Biaya personal yang berasal dari uang sekolah (tanpa keringanan biaya pendidikan).
10. Biaya personal yang bersal dari uang sekolah (dengan keringanan biaya pendidikan).
11. Biaya pendaftaran ulang siswa setiap awal tahun.
12. Biaya subsidi silang meliputi: pengurangan dan pembebasan biaya pendidikan, pemberian beasiswa maupun bentuk bantuan lainnya.
13. Pungutan biaya personal di samping uang program keahlian.
14. Pengambilan keputusan untuk menetapkan biaya personal melibatkan berbagai pihak.
15. Biaya personal yang berasal dari dana masyarakat tercantum dalam RKS-S/M.
16. Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan selama empat tahun terakhir.
17. Dilaksanakan pembukuan biaya operasional selama empat tahun terakhir.
18. Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selam empat tahun terakhir.

3. Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Transparansi sekolah adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Surya Dharma, 2010). Istilah transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya kepada publik.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan secara timbal balik antara sekolah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudahan akses dan penyediaan informasi merupakan pokok penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam menciptakan prinsip transparansi. Pemberdayaan berbagai media informasi baik media cetak maupun media elektronik merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mempermudah penyediaan informasi.

Prinsip transparansi sekolah tidak hanya menyediakan dan memberikan informasi mengenai sekolah yang ada. Mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mendapatkan informasi haruslah dibuat sebagaimana mestinya guna

meningkatkan prinsip transparansi. Seperti yang dikemukakan oleh Surya Dharma (2010) upaya yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, durasi waktu untuk mendapatkan informasi, dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Transparansi akan membawa dampak dan konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari publik dan pihak yang terkait dengan pendidikan (*stakeholders*). Dengan demikian transparansi tidak sepenuhnya harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Loina Lalolo Krina P (2003) bahwa kewajiban akan transparansi harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, prinsip transparansi dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan. Loina Lalolo Krina P (2003) telah mengemukakan bahwa prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- b. Kemudahan akses informasi
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata *account* yang berarti catatan atau laporan dan *ability* yang berarti kemampuan. Akuntabilitas (*accountability*) secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggung jawaban. Organisasi yang *accountable* adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif (Sutama, 2006).

Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas yang dikutip oleh Lolina Lalolo Krina (2003) bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Sekolah merupakan pihak yang diberi mandat dalam mengelola pendidikan. Dengan demikian sekolah harus memberikan pertanggung jawaban atas kebijakan dan aturan-aturan yang telah dibuat kepada pihak yang terkait dengan pendidikan (*stakeholders*).

Pertanggung jawaban kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah tentunya harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Perencanaan yang sudah ditetapkan akan menjadi dasar untuk membangun prinsip akuntabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Surya Darma (2007) yang dikutip oleh Sutedjo (2009) bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
2. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik (Surya Dharma, 2010).

Sekolah dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Surya Dharma, 2010). Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya indikator yang jelas dan penilaian secara obyektif. Pengawasan dan pemberian sanksi yang jelas merupakan aturan main yang harus ditegakkan jika terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait akuntabilitas.

Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Surya Dharma (2010) bahwa untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi, sekolah perlu mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggung jawaban. Ini perlu diupayakan untuk menjaga kepastian tentang pentingnya akuntabilitas.
- b. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- c. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/*stakeholders* di awal setiap tahun anggaran.
- d. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada *stakeholders*.
- e. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/*stakeholders* di akhir tahun.
- f. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik.
- g. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- h. Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang ada mengenai akuntabilitas, prinsip akuntabilitas dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan. Berikut ini beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas (Loina Lalolo Krina P, 2003):

- a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
- d. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
- e. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa.
- f. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- g. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini memiliki kesamaan atau berkaitan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Sutedjo (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah". Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru, karyawan, pengurus komite sekolah dan objek penelitian yaitu SMP Negeri 1 Kendal, SMP Negeri 2 Kendal, SMP Negeri 1 Weleri Kendal, SMP Negeri 1 Sukorejo Kendal dan SMP Negeri 1 Boja kendal, juga Peneliti APBS dari Dinas Dikpora Kabupaten Kendal, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang bergerak atau peduli dengan bidang pendidikan. Teknik analisis dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas dan uji t. Hasil penelitian ini dari analisis statistik yang dilakukan disimpulkan bahwa menunjukkan penemuan: 1) adanya perbedaan rata-rata persepsi *stakeholder* (internal dan eksternal) terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kkendal, 2) adanya perbedaan rata-rata persepsi *stakeholder* (internal dan eksternal) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal.

2. Novi Eka Rahmawati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat". Survei dilakukan pada 272 masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbagi dalam lima kabupaten/kota. Masyarakat diminta untuk memberikan tanggapan mereka terhadap pemerintah daerah dengan mengisi kuesioner mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah serta kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method), yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

3. Amin Rahmanurrasjid (2008) dalam penelitiannya yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah". Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian utama yang diperlukan adalah bahan kepustakaan atau lazim disebut data sekunder, sedangkan penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data primer hanya dilakukan sebagai bahan rujukan dan pelengkap, yang teknik pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dengan masalah yang diteliti kemudian penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah menemui kendala karena tidak adanya evaluasi dari pemerintah atas penyampaian LPPD, penyampaian LKPJ tidak disertai dengan perhitungan APBD, pembahasan di DPRD yang cenderung bersifat politis dan sikap masyarakat yang apatis terhadap informasi LPPD yang disampaikan.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada salah satu variabel yang diteliti, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana pendidikan sekolah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, subyek penelitian, serta hasil penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dibahas.

C. Kerangka Berfikir

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pendidikan.

Lembaga pendidikan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan publik berpikir negatif. Keterbatasan akses informasi yang diberikan akan membuat publik merasa tidak percaya terhadap lembaga pendidikan yang ada.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban. Lembaga pendidikan yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan. Publik akan berpikir bahwa lembaga pendidikan yang ada tidak profesional dan menduga adanya praktik KKN dalam pengelolaan pada lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan yang transparan akan menimbulkan dampak positif terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan akan membuat publik semakin percaya. Selain itu lembaga pendidikan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada. Sehingga publik akan menilai bahwa lembaga pendidikan tersebut profesional dan tidak KKN. Dengan demikian pengelolaan dana pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir pada penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan mengenai penelitian ini, yaitu:

- 1.** Bagaimanakah transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan?
- 2.** Bagaimanakah akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan?
- 3.** Bagaimanakah pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah Prambanan yang beralamat di jalan prambanan – piyungan km.1, Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Pelaksanaan penelitian ini pada bulan Januari 2014 sampai April 2014.

C. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah Muhammadiyah Prambanan dan Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. Transparansi

Transparansi merupakan istilah yang berasal dari kata *transparent* yang memiliki makna jelas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata *account* yang berarti catatan atau laporan dan *ability* yang berarti kemampuan. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban laporan atau catatan yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

3. Pengelolaan dana pendidikan

Pengelolaan dana pendidikan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dalam manajemen keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola sekolah. Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari konsep manajemen keuangan sekolah yang harus direncanakan dan diatur dengan baik dan benar. Perencanaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah dalam menyusun dan merumuskan pengelolaan dana pendidikan di sekolah.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang nantinya digunakan sebagai pengukuran terhadap variabel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012:142). Hal senada juga dikemukakan oleh Anas Sudijono (2008:30), angket yaitu cara pengumpulan data berbentuk

pengajuan pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Jenis angket yang digunakan pada penelitian ini adalah angket tertutup karena jawaban sudah disediakan sehingga responden tinggal memberikan jawaban dengan tanda (X) pada pilihan jawaban yang sudah ada. Angket ini menggunakan skala *likert* dengan empat pilihan jawaban yang menunjukkan tingkatan. Alasan digunakan angket untuk pengambilan data adalah subjek paling mengetahui dirinya sendiri, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan interpretasi yang diajukan sama dengan yang dikemukakan oleh peneliti. Supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliabel, maka sebelum instrumen digunakan perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dan jawaban dari responden yang lebih jelas. Menurut Sugiyono (2012:137), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Pedoman wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Instrumen dipilih berdasarkan indikator yang diteliti. Instrumen penelitian dibuat mengacu pada indikator-indikator yang terdapat pada rumusan masalah, setelah diperoleh indikator tersebut, selanjutnya peneliti mempersiapkan kisi-kisi untuk membuat instrumen penelitian.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar *kuesioner* dan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh SMK Muhammadiyah Prambanan. Metode *kuesioner* dilakukan kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, sedangkan metode wawancara hanya dilakukan kepada Kepala Sekolah. Instrumen angket yang digunakan yaitu skala pengukuran model *Likert* dengan empat pilihan jawaban yaitu, sangat sesuai; cukup sesuai; tidak sesuai ; dan sangat tidak sesuai. Jawaban sangat sesuai diberikan skor 4 (empat), cukup sesuai diberikan skor 3 (tiga), jawaban tidak sesuai diberikan skor 2 (dua), dan jawaban sangat tidak sesuai diberikan skor 1 (satu).

1. Instrumen Transparansi

Instrumen transparansi dapat disusun berdasarkan indikator-indikator : (1) penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur; (2) penyediaan informasi yang jelas tentang biaya; (3) kemudahan akses informasi; (4) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar; (5) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa; (6) meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintahan. Penjabaran indikator ke dalam butir-butir pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kisi-kisi instrumen transparansi

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1	Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur	3,8	2 butir
2	Penyediaan informasi yang jelas tentang biaya	1,5	2 butir
3	Kemudahan akses informasi	2	1 butir
4	Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar	4,7	2 butir
5	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa	6,10	2 butir
6	Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintahan	9	1 butir
Jumlah			10 butir

2. Instrumen Akuntabilitas

Instrumen akuntabilitas dapat disusun berdasarkan indikator-indikator : (1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis; (2) Kelayakan target operasional; (3) Setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika yang berlaku; (4) Sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar; (5) Kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; (6) kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil; (7) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa; (8) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat; (9) Sistem informasi manajemen. Penjabaran indikator ke dalam butir-butir pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kisi-kisi instrumen akuntabilitas

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1	Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis	1	1 butir
2	Kelayakan target operasional	7,8	2 butir
3	Setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika yang berlaku	2	1 butir
4	Sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar	3	1 butir
5	Kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program	5	1 butir
6	kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil	4,6,11	3 butir
7	Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa	9	1 butir
8	Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat	10	1 butir
9	Sistem informasi manajemen	12	1 butir
Jumlah			12 butir

3. Instrumen Pengelolaan Dana Pendidikan

Instrumen pengelolaan dana pendidikan dapat disusun berdasarkan indikator-indikator : (1) Biaya pendapatan; (2) Biaya pengeluaran; (3) Anggaran kebutuhan pendidikan; (4) Biaya personal pendidikan; (5) Biaya operasional pendidikan; (6) Biaya subsidi silang; (7) Biaya pendaftaran ulang siswa; (8) Alokasi biaya operasional sekolah; (9) Alokasi biaya kegiatan sekolah; (10) Pengambilan keputusan untuk menentukan biaya personal; (11) Kepemilikan

pedoman pengelolaan keuangan; (12) Dilaksanakan pembukuan belanja operasional; (13) Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Penjabaran indikator ke dalam butir- butir pernyataan dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3 . Kisi - kisi instrumen pengelolaan dana pendidikan

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1	Biaya pendapatan	1	1 butir
2	Biaya pengeluaran	3	1 butir
3	Anggaran kebutuhan pendidikan	2	1 butir
4	Biaya personal pendidikan	21,22	2 butir
5	Biaya operasional pendidikan	4,5	2 butir
6	Biaya subsidi silang	20	1 butir
7	Biaya pendaftaran ulang siswa	19	1 butir
8	Alokasi biaya operasional sekolah	11,12,13,14,15	5 butir
9	Alokasi biaya kegiatan sekolah	6,7,8,9,10,16	6 butir
10	Pengambilan keputusan untuk menentukan biaya personal	22	1 butir
11	Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan	23,24	2 butir
12	Dilaksanakan pembukuan belanja operasional	25	1 butir
13	Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	26	1 butir
Jumlah			26 butir

4. Pedoman Wawancara

Wawancara diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian tentang sikap dan pendapat yang diambil melalui kuesioner. Wawancara ini ditujukan kepada responden yaitu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan dengan pertimbangan bahwa Kepala Sekolah merupakan orang yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam pengelolaan biaya-biaya pendidikan yang ada di sekolah. Instrumen untuk wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Sekolah mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana yang ada di sekolah. Penjabaran indikator ke dalam butir-butir pernyataan dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pedoman Wawancara

Variabel	Indikator Wawancara
Transparansi	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan informasi• Kemudahan akses informasi• Mekanisme pengaduan• Peningkatan arus informasi
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none">• Laporan penggunaan dana• Bentuk-bentuk pertanggung jawaban
Pengelolaan Dana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Pola penyusunan RAPBS• Identifikasi sumber dana• Penggunaan dana• Pengeluaran dana• Pencatatan penggunaan pengeluaran• Pelaporan

G. Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Instrumen yang valid yaitu instrumen yang mempunyai validitas tinggi. Instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diharapkan, yaitu dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Validitas dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) validitas isi, (2) validitas kriteria, (3) validitas konstruksi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan validitas konstruksi (*construct validity*) yaitu uji validitas dengan cara penilaian atau pertimbangan para ahli (*expert judgement*).

H. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas menunjuk kepada ketetapan suatu pengukuran, apakah hasil pengukuran sama jika instrumen tetap sedangkan objeknya berlainan, atau objek yang tetap sedangkan instrumen yang berlainan. Pengukuran dengan kejadian seperti di atas dengan hasil tetap, maka test tersebut memiliki reliabilitas tinggi. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Spearman-Brown.

I. Teknik Analisis Data

Jenis data penelitian ini adalah data ordinal, untuk membuat kriteria pencapaian data ordinal yang ada, selanjutnya dirubah ke dalam bentuk interval. Pada instrumen angket yang digunakan terdapat 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu: sangat sesuai (4), cukup sesuai (3), tidak sesuai (2), sangat tidak sesuai (1). Empat pilihan jawaban yang ada tersebut digunakan untuk menentukan adanya gradasi yang akan dirubah ke dalam bentuk interval yang diperoleh dari perhitungan skor minimal dan skor maksimal yang nantinya digunakan untuk

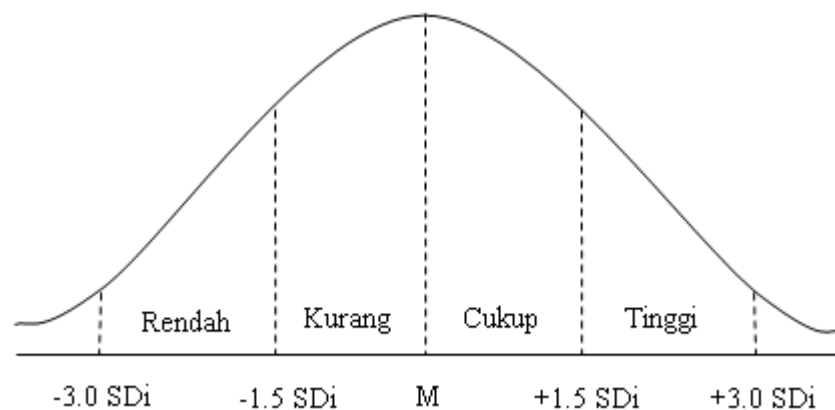
mencari standar deviasi ideal dan *mean* ideal. Standar deviasi ideal dan *mean* ideal digunakan untuk menentukan interval prosentase pencapaian ke dalam 4 kriteria. Pembagian jarak interval dicari dengan membuat kurva normal yang terbagi menjadi 4 kategori. Pengkategorian dibagi menjadi empat kriteria yaitu tinggi, cukup, kurang, rendah. Pengkategorian tersebut mengacu pada buku Pengantar Statistik Pendidikan (Anas Sudijono, 2011 : 170) sehingga diperoleh perhitungan berikut ini.

$$4 \text{ skala} = 6 \text{ Sdi}$$

$$1 \text{ skala} = 6/4 \text{ Sdi} = 1,5 \text{ Sdi}$$

Perhitungan tersebut menjadi acuan dalam pembagian kurva kategori data.

Kurva kategori data lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 . Kurva Kategori Data

Berdasarkan Kurva Kategori Data kecenderungan variabel diperoleh rumus seperti pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 . Distribusi Kategori Data

No	Rentang Skor (i)	Kategori
1	($M_i + 1,5 S_{Di}$) sampai dengan (ST)	Tinggi
2	($M_i + 0,0 S_{Di}$) sampai dengan ($M_i + 1,5 S_{Di}$)	Cukup
3	($M_i - 1,5 S_{Di}$) sampai dengan ($M_i + 0,0 S_{Di}$)	Kurang
4	(SR) sampai dengan ($M_i - 1,5 S_{Di}$)	Rendah

Keterangan:

M_i = Rerata / mean ideal

S_{Di} = Standar Deviasi Ideal

M_i = $1/2$ (Skor ideal tertinggi + skor ideal terendah)

S_{Di} = $1/6$ (Skor ideal tertinggi – skor ideal terendah)

ST = Skor Tertinggi

SR = Skor Terendah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan. Deskripsi data yang disajikan yaitu meliputi transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan, akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan, dan pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan. Data penelitian ini diperoleh dengan menyusun instrumen yang berupa lembar angket dan lembar wawancara. Angket digunakan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana pendidikan yang ditujukan kepada responden yaitu Kepala Sekolah Muhammadiyah Prambanan dan Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Wawancara digunakan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana pendidikan yang hanya ditujukan atau ditanyakan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Deskripsi data yang disajikan untuk mengetahui tingkat transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana pendidikan yang terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), *Median* (Me), *Modus* (Mo), Standar Deviasi (SD).

B. Hasil Penelitian

1. Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan

Proses pengumpulan data untuk mengetahui tingkat transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan diperoleh dari hasil pengisian angket yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan dan Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan serta hasil wawancara yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan.

Data transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dari pengisian angket ditentukan melalui instrumen dan indikator mengenai transparansi, yaitu: (1) penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur; (2) penyediaan informasi yang jelas tentang biaya; (3) kemudahan akses informasi; (4) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar; (5) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa; (6) meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintahan. Sedangkan data transparansi yang diperoleh dari hasil wawancara ditentukan melalui pedoman dan indikator wawancara tentang transparansi, yaitu: (1) penyediaan informasi; (2) kemudahan akses informasi; (3) mekanisme pengaduan; (4) peningkatan arus informasi.

Berdasarkan indikator tentang transparansi yang sudah ditentukan maka selanjutnya dilakukan langkah pengukuran dengan menggunakan 10 butir instrumen dengan 4 pilihan jawaban, sehingga diperoleh hasil perhitungan pada Lampiran 8. Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan interval kriteria pencapaian dan distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada Tabel 6.

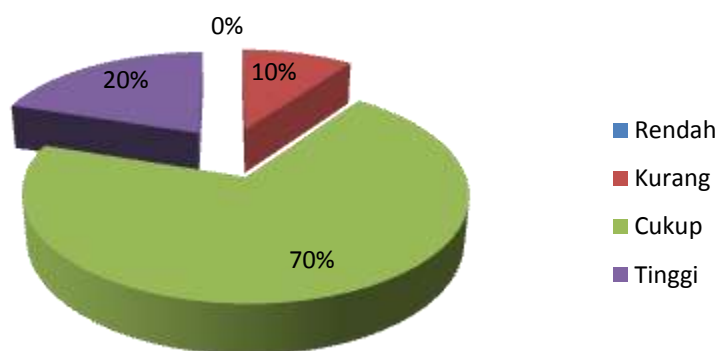
Tabel 6. Rangkuman Distribusi Kriteria Transparansi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	1	10.0	10.0	10.0
	Cukup	7	70.0	70.0	80.0
	Tinggi	2	20.0	20.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Data Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan terdapat 2 dari total keseluruhan responden memiliki persentase

20% dengan kategori tinggi, 7 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 70% dengan kategori cukup, dan 1 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 10% dengan kategori kurang.

Persentase transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut:



Gambar 2. Persentase Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan

Skor rata-rata transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dengan pengumpulan data sebesar 30,20. Langkah untuk identifikasi kecenderungan skor rata-rata dicari berdasarkan skor tertinggi dan jumlah butir instrumen transparansi yaitu $4 \times 10 = 40$. Dengan demikian nilai transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan adalah $30,20 : 40 = 0,755$ atau 75,5%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk kategori cukup transparan dengan skor rata-rata 30,20 atau memperoleh nilai 75,5% dari yang diharapkan.

Proses pengumpulan data yang selanjutnya untuk mengetahui transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan adalah dengan menggunakan wawancara yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Hal tersebut dilakukan guna memperkuat hasil yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu

menggunakan kuesioner (angket). Metode wawancara dilakukan berdasarkan indikator transparansi yang sudah ditentukan.

Hasil wawancara berdasarkan indikator yang sudah ditentukan terkait transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa penyediaan informasi yang diberikan oleh pihak sekolah dimulai sejak awal tahun ajaran baru dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap kegiatan pendidikan di sekolah dan selalu membuat laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir tahun ajaran sekolah.
2. Kemudahan akses hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu saja, dikarenakan agar pengelolaan manajemen kebijakan sekolah yang telah dibuat bisa berjalan lebih efisien.
3. Mekanisme pengaduan jika terdapat sebuah pelanggaran akan diberikan langsung atau melalui teguran.
4. Peningkatan arus informasi dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan beberapa media massa diantaranya adalah kedaulatan rakyat, suara muhammadiyah, radio, baliho, dll.

2. Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan

Proses pengumpulan data untuk mengetahui tingkat akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan diperoleh dari hasil pengisian angket yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan dan Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan serta hasil wawancara yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan.

Data akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dari pengisian angket ditentukan melalui instrumen dan indikator mengenai akuntabilitas, yaitu: (1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis; (2) Kelayakan target operasional; (3) Setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika yang berlaku; (4) Sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar; (5) Kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; (6) kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil; (7) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa; (8) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat; (9) Sistem informasi manajemen. Sedangkan data akuntabilitas yang diperoleh dari hasil wawancara ditentukan melalui pedoman dan indikator wawancara tentang akuntabilitas, yaitu: (1) Laporan penggunaan dana; (2) Bentuk-bentuk pertanggung jawaban.

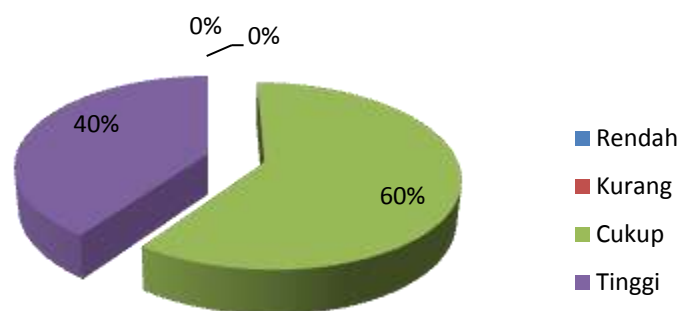
Berdasarkan indikator tentang akuntabilitas yang sudah ditentukan maka selanjutnya dilakukan langkah pengukuran dengan menggunakan 12 butir instrumen dengan 4 pilihan jawaban, sehingga diperoleh hasil perhitungan pada Lampiran 8. Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan interval kriteria pencapaian dan distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rangkuman Distribusi Kriteria Akuntabilitas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid cukup	6	60.0	60.0	60.0
tinggi	4	40.0	40.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Data Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan terdapat 4 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 40% dengan kategori tinggi dan 6 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 60% dengan kategori cukup.

Persentase transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan dapat dilihat pada Gambar 3. Berikut:



Gambar 3. Persentase Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan

Skor rata-rata akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dengan pengumpulan data sebesar 38,70. Langkah untuk identifikasi kecenderungan skor rata-rata dicari berdasarkan skor tertinggi dan jumlah butir instrumen akuntabilitas yaitu $4 \times 12 = 48$. Dengan demikian nilai akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan adalah $38,70 : 48 = 0,806$ atau 80,6%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa akuntabilitas SMK Muhammadiyah prambanan termasuk kategori cukup akuntabel dengan rata-rata 38,70 atau memperoleh nilai 80,6% dari yang diharapkan.

Proses pengumpulan data yang selanjutnya untuk mengetahui akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan adalah dengan menggunakan wawancara yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Hal tersebut

dilakukan guna memperkuat hasil yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu menggunakan kuesioner (angket). Metode wawancara dilakukan berdasarkan indikator akuntabilitas yang sudah ditentukan.

Hasil wawancara berdasarkan indikator yang sudah ditentukan terkait transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan penggunaan dana dibuat dalam bentuk buku laporan keuangan yang sebelumnya dianalisis oleh seorang akuntan dan dilakukan setiap tahun ajaran berlangsung. Dipergunakannya seorang akuntan adalah untuk memudahkan dan mengetahui neraca keuangan dalam penggunaan dana pendidikan di sekolah. Dengan demikian akan lebih mudah diketahui, apakah penggunaan dana pendidikan sudah efektif atau belum efektif.
2. Semua pengeluaran pembiayaan sekolah harus disertai dengan adanya bukti keuangan yang digunakan. Jika bukti keuangan dibuat sendiri harus disertakan tanda tangan dan diketahui minimal 2 orang kemudian diserahkan kepada bendahara. Jika bukti keuangan berupa nota dari toko, Kepala Sekolah wajib mengetahui dan menandatangani.
3. Setiap pengeluaran biaya pendidikan dalam bentuk apapun baik besar maupun kecil selalu dicatat atau ditulis dalam buku kas pembiayaan sekolah.
4. Bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan semuanya dituliskan di dalam buku laporan keuangan. Semua komponen biaya maupun pembiayaan terdapat di dalam buku laporan tersebut meskipun besaran biaya-biaya yang ada tidak dituliskan secara rinci, hanya dituliskan secara garis besarnya saja.

3. Pengelolaan Dana Pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan

Proses pengumpulan data untuk mengetahui tingkat pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan diperoleh dari hasil pengisian angket yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan dan Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan serta hasil wawancara yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan.

Data pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dari pengisian angket ditentukan melalui instrumen dan indikator mengenai pengelolaan dana pendidikan, yaitu: (1) Biaya pendapatan; (2) Biaya pengeluaran; (3) Anggaran kebutuhan pendidikan; (4) Biaya personal pendidikan; (5) Biaya operasional pendidikan; (6) Biaya subsidi silang; (7) Biaya pendaftaran ulang siswa; (8) Alokasi biaya operasional sekolah; (9) Alokasi biaya kegiatan sekolah; (10) Pengambilan keputusan untuk menentukan biaya personal; (11) Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan; (12) Dilaksanakan pembukuan belanja operasional; (13) Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. sedangkan data pengelolaan dana pendidikan yang diperoleh dari hasil wawancara ditentukan melalui pedoman dan indikator wawancara tentang pengelolaan dana pendidikan, yaitu: (1) Pola penyusunan RAPBS; (2) Identifikasi sumber dana; (3) Penggunaan dana; (4) Pengeluaran dana; (5) Pencatatan penggunaan pengeluaran; (6) Pelaporan.

Berdasarkan indikator tentang akuntabilitas yang sudah ditentukan maka selanjutnya dilakukan langkah pengukuran dengan menggunakan 26 butir instrumen dengan 4 pilihan jawaban, sehingga diperoleh hasil perhitungan pada

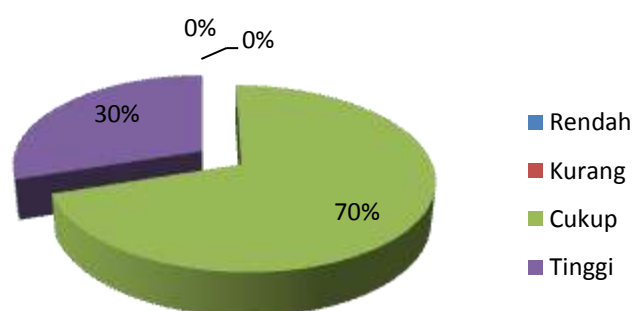
Lampiran 8. Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan interval kriteria pencapaian dan distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rangkuman Distribusi Kriteria Pengelolaan Dana Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	7	70.0	70.0	70.0
	tinggi	3	30.0	30.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Data Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan terdapat 3 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 30% dengan kategori tinggi dan 7 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 70% dengan kategori cukup.

Persentase transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan dapat dilihat pada Gambar 4. Berikut:



Gambar 4. Persentase Pengelolaan Dana Pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan

Skor rata-rata pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dengan pengumpulan data sebesar 81,80. Langkah untuk identifikasi kecenderungan skor rata-rata dicari berdasarkan skor tertinggi dan jumlah butir instrumen pengelolaan dana pendidikan yaitu $4 \times 26 = 104$. Dengan demikian nilai akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan adalah $81,80 : 104 = 0,786$ atau 78,6%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah prambanan termasuk kategori cukup baik dengan rata-rata 81,80 atau memperoleh nilai 78,6% dari yang diharapkan.

Proses pengumpulan data yang selanjutnya untuk mengetahui pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan adalah dengan menggunakan wawancara yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Hal tersebut dilakukan guna memperkuat hasil yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu menggunakan kuesioner (angket). Metode wawancara dilakukan berdasarkan indikator pengelolaan dana pendidikan yang sudah ditentukan.

Hasil wawancara berdasarkan indikator yang sudah ditentukan terkait transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan program-program yang sudah dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S). Setiap pengeluaran dana pendidikan sudah disesuaikan dalam anggaran untuk masing-masing kegiatan pendidikan, akan tetapi untuk besaran dana yang dikeluarkan tidak sepenuhnya tercukupi, hanya 85% saja dan sisanya

sebesar 15% digunakan sebagai uang atau angka keamanan untuk kebutuhan lainnya.

2. Peran Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan adalah sebagai pengendali atau pengawas agar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S) yang sudah dibuat. Namun dalam kebijakan ini Kepala Sekolah selalu bekerja sama dengan bendahara untuk memutuskan suatu kebijakan penggunaan dana di sekolah.
3. Setiap penyusunan RAPBS semua pihak yang terkait dengan pendidikan selalu dilibatkan, baik dari pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah, diantaranya : Bendahara, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Waka (sarana dan prasarana, kesiswaan, kurikulum, dan humas) Kaprodi (mesin, elind, otomotif, TKJ) dan Komite Sekolah.
4. Setiap penyusunan RAPBS guru tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan oleh pihak Waka. Jika melibatkan semua guru yang ada maka waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk menyusun RAPBS bahkan tidak akan selesai dikarenakan akan terlalu banyak perbedaan pendapat yang muncul, padahal anggaran yang sudah ada harus berjalan dan digunakan.
5. Pemasukan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan bersal dari berbagai sumber, diantaranya: APBN, APBD, Komite Sekolah, APBDP (dana bantuan), dan unit produksi. Dari berbagai sumber dana tersebut, pemasukan yang terbesar berasal dari Komite Sekolah sedangkan untuk unit produksi meskipun tidak terlalu besar tetapi memberikan nilai tambahan pemasukan dana untuk sekolah. Untuk sumber dana yang bersal dari bantuan besaran yang diperoleh tidak dapat ditentukan atau tidak pasti

dikarenakan banyak pihak-pihak yang secara bersama-sama mengajukan dana bantuan pendidikan, sehingga jumlah besaran dana dan sekolah mana yang akan mendapatkannya belum pasti.

6. Bagian keuangan selalu melaporkan keuangan setiap 2 (dua) minggu sekali dalam bentuk buku laporan keuangan sehingga di dalam laporan tersebut akan diketahui berapa besar dana yang masuk dan berapa besar dana yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Selain itu setiap bulan dan setiap semester laporan keuangan juga akan dilaporkan, dengan itu jika masih terdapat kekurangan dana atau siswa yang dikatakan belum membayar maka setiap orang tua/wali murid masing-masing siswa akan diberitahu jika masih memiliki tunggakan pembayaran.
7. Laporan pengelolaan dana pendidikan disampaikan kepada pihak pimpinan Muhammadiyah tingkat wilayah/provinsi, pimpinan Muhammadiyah tingkat daerah/kabupaten, dan pimpinan yayasan sekolah.
8. Kepala Sekolah tidak selalu memeriksa keuangan secara langsung, karena sebelum Kepala Sekolah memeriksa pihak bagian kas keuangan sudah melaporkan terlebih dahulu sehingga Kepala Sekolah tinggal menyetujui atau menandatangani secara langsung.

C. Pembahasan

1. Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan, diperoleh skor 75,5%. Berdasarkan kriteria persentase pencapaian tingkat transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori

cukup transparan. Hasil perolehan skor tingkat transparansi tersebut diperkuat berdasarkan hasil temuan yang digali melalui wawancara mengenai transparansi dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pihak SMK Muhammadiyah Prambanan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan baik meskipun untuk beberapa hal tidak dapat diberikan secara langsung atau terbuka. Hal tersebut dilakukan dengan alasan pertimbangan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam menerapkan sebuah kebijakan sekolah seperti yang dijelaskan oleh Loina Lalolo Krina P (2003) bahwa keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Transparansi merupakan prinsip untuk membangun kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Penyediaan informasi yang memadai dan kemudahan dalam memperoleh informasi merupakan unsur penting dalam menciptakan prinsip transparansi. Berdasarkan persentase perolehan skor mengenai transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan yang termasuk dalam kategori baik masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi agar SMK Muhammadiyah Prambanan menjadi lembaga pendidikan yang lebih bersih dan berwibawa sehingga kepercayaan publik akan semakin tinggi terhadap SMK Muhammadiyah Prambanan sebagai pihak penyelenggara pendidikan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekolah antara lain (Surya Dharma,

2010): (1) Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi, baik secara langsung melalui temu wicara maupun secara tidak langsung melalui jalur media tertulis; (2) Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi yang dapat diakses oleh publik maupun bentuk informasi yang bersifat rahasia; (3) durasi waktu untuk mendapatkan informasi; (4) prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

2. Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan, diperoleh skor 80,6%. Berdasarkan kriteria persentase pencapaian tingkat transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup akuntabel. Hasil perolehan skor tingkat akuntabilitas tersebut diperkuat berdasarkan hasil temuan yang digali melalui wawancara mengenai akuntabilitas dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pihak SMK Muhammadiyah Prambanan selalu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kebijakan-kebijakan mengenai akuntabilitas yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh pihak sekolah seperti pembuatan laporan keuangan dalam bentuk buku laporan keuangan, pendapatan dan pengeluaran biaya pendidikan dalam bentuk apapun baik besar maupun kecil selalu dicatat dalam buku laporan keuangan dan harus disertai dengan bukti atau nota.

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk menilai kinerja dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk

mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik (Surya Dharma, 2010). Berdasarkan persentase perolehan skor mengenai akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan yang termasuk dalam kategori baik masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi agar SMK Muhammadiyah Prambanan menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik dan terpercaya. Akuntabilitas yang tinggi dapat dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut, (Surya Dharama, 2010): (1) Sekolah harus menyusun aturan main tentang akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban; (2) Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas; (3) sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/*stakeholders* di awal setiap tahun anggaran; (4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada *stakeholders*; (5) melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/*stakeholders* di akhir tahun; (6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik; (7) menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan; (8) Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

3. Pengelolaan Dana Pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan, diperoleh skor 78,6%. Berdasarkan kriteria persentase pencapaian pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah

Prambanan termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil perolehan skor pengelolaan dana pendidikan tersebut diperkuat berdasarkan hasil temuan yang digali melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan mengenai pengelolaan dana pendidikan. Hasil temuan tersebut dapat dijelaskan bahwa SMK Muhammadiyah Prambanan dalam pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan program-program yang dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S), Komite maupun Guru yang diwakilkan melalui waka dilibatkan dalam penyusunan RAPBS, dan melaporkan pengelolaan dana pendidikan kepada pihak pimpinan Muhammadiyah baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah dan pimpinan yayasan sekolah.

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari manajemen sekolah yang sangat penting. Pengelolaan dana pendidikan adalah rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Berdasarkan persentase perolehan skor tentang pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan yang termasuk dalam kategori baik masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut dilakukan agar SMK Muhammadiyah Prambanan menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik dan professional dalam pengelolaan dana pendidikan.

Partisipasi masyarakat sangat penting keberadaannya dalam pengelolaan dana pendidikan disekolah yang disebut dengan komite sekolah. Peran serta dan pemberdayaan komite sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan dapat dijadikan sebagai pihak yang dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah tentang kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran

pendidikan dan belanja sekolah. Komite sekolah merupakan sebagai pihak pendukung, pemberi pertimbangan, mediator dan pengontrol pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan peran komite sekolah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, bahwa komite sekolah berperan sebagai: (1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.; (4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Manajemen pengelolaan dana pendidikan harus direncanakan dengan baik sesuai dengan prinsip manajemen keuangan. Besaran biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan harus mampu diidentifikasi dan dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing jurusan. Penerapan sistem manajemen *ABC (Activity Based Costing)* merupakan salah satu langkah untuk menjadikan pengelolaan dana pendidikan yang baik. Sistem manajemen *ABC (Activity based Costing)* merupakan metode yang menerapkan konsep-konsep akuntansi berbasis aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat berdasarkan kegiatan dan alokasi waktu penyelenggaraan pendidikan. Tahapan awal dalam mengimplemetasikan sistem *manajemen ABC (Activity Based Costing)* adalah dengan mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, target dan lingkup pendidikan yang ada, serta tipe

manajemen yang diharapkan untuk mengelola kegiatan tersebut dan selanjutnya pengalokasian biaya sesuai dengan masing kegiatan tersebut.

Pengawasan atau monitoring merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pengelolaan dana pendidikan yang baik sehingga diperlukan adanya auditor keuangan. Auditor keuangan dapat berasal dari pihak internal sekolah ataupun pihak eksternal sekolah. Keberadaan auditor keuangan akan sangat membantu pihak sekolah dalam penggunaan dana pendidikan dan mengantisipasi adanya penyalahgunaan keuangan. Auditor keuangan akan lebih baik jika berasal dari pihak eksternal sekolah ataupun berasal dari keduanya. Hal tersebut dikarenakan untuk mengantisipasi dan mengurangi adanya kecurangan jika terjadi sebuah pelanggaran atau penyalahgunaan dana pendidikan serta atau berusaha untuk menutupi kesalahan yang dilakukan pihak sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan prinsip transparansi yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah tergolong baik. Dengan demikian SMK Muhammadiyah Prambanan cukup transparan dalam menentukan dan mengelola sebuah kebijakan.
2. Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan prinsip akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah tergolong baik. Dengan demikian SMK Muhammadiyah Prambanan cukup akuntabel dalam menentukan dan mengelola sebuah kebijakan.
3. Pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan dana pendidikan tergolong baik dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S) yang sudah dibuat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dapat diperoleh implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup baik memberikan petunjuk bahwa SMK

Muhammadiyah Prambanan telah sesuai dengan system pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan Indonesia dalam mengelola biaya pendidikan yang ada.

2. Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan yang termasuk dalam kategori cukup memberikan petunjuk kepada pihak sekolah untuk lebih meningkatkan prinsip transparansi dan memberikan kemudahan akses masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan untuk memperoleh informasi dari sekolah agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang lebih terpercaya.
3. Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan yang termasuk dalam kategori cukup memberikan petunjuk kepada pihak sekolah untuk lebih meningkatkan prinsip akuntabilitas dan informasi yang berkaitan dengan sebuah kebijakan manajemen sekolah harus lengkap dan akurat agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang lebih terpercaya dan professional.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini terbatas pada populasi SMK Muhammadiyah Prambanan dengan sampel penelitian yang kecil sehingga memiliki kelemahan dalam menggeneralisasikan hasil penelitian ini.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan wawancara, tidak menggunakan dokumentasi pengumpulan data.

D. Saran

Hasil penelitian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan hasil tersebut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan pengelolaan dana pendidikan .
3. Menghadirkan auditor keuangan dari pihak eksternal yang professional di bidangnya.
4. Memberikan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan pendidikan kepada semua pihak yang terkait dengan pendidikan dengan transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN

Kisi – Kisi Instrumen Penelitian

Instrumen Transparansi

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1	Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur	3,8	2 butir
2	Penyediaan informasi yang jelas tentang biaya	1,5	2 butir
3	Kemudahan akses informasi	2	1 butir
4	Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar	4,7	2 butir
5	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa	6,10	2 butir
6	Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintahan	9	1 butir
Jumlah			10 butir

Instrumen Akuntabilitas

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1	Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis	1	1 butir
2	Kelayakan target operasional	7,8	2 butir
3	Setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika yang berlaku	2	1 butir
4	Sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar	3	1 butir
5	Kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program	5	1 butir
6	kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil	4,6,11	3 butir
7	Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa	9	1 butir
8	Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat	10	1 butir
9	Sistem informasi manajemen	12	1 butir
Jumlah			12 butir

Instrumen Pengelolaan Dana Pendidikan

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1	Biaya pendapatan	1	1 butir
2	Biaya pengeluaran	3	1 butir
3	Anggaran kebutuhan pendidikan	2	1 butir
4	Biaya personal pendidikan	21,22	2 butir
5	Biaya operasional pendidikan	4,5	2 butir
6	Biaya subsidi silang	20	1 butir
7	Biaya pendaftaran ulang siswa	19	1 butir
8	Alokasi biaya operasional sekolah	11,12,13,14,15	5 butir
9	Alokasi biaya kegiatan sekolah	6,7,8,9,10,16	6 butir
10	Pengambilan keputusan untuk menentukan biaya personal	22	1 butir
11	Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan	23,24	2 butir
12	Dilaksanakan pembukuan belanja operasional	25	1 butir
13	Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	26	1 butir
Jumlah			26 butir

Angket

**Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan
di SMK Muhammadiyah Prambanan**

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____

Jabatan : _____



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MEKATRONIKA
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

PENGANTAR KUESIONER

Kepada Yth.

Kepala Sekolah dan Komite SMK Muhammadiyah Prambanan di Prambanan

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan” saya memohon Anda berkenan untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan dalam surat pengantar kuesioner ini.

Kuesioner ini dibuat semata-mata untuk kepentingan penelitian, sehingga perkenan dan kesediaan Anda mengisi kuesioner ini apa adanya (dengan sebenar-benarnya), akan sangat membantu obyektifitas hasil penelitian yang dilakukan. Setiap jawaban yang Anda berikan, merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penyelesaian penelitian ini.

Atas perkenan dan partisipasi Anda dalam penyelesaian penelitian ini, saya haturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, Maret 2014

Peneliti,

(Tomi Viktoria)

Instrumen 1. Transparansi

Petunjuk pengisian:

Dengan memberi tanda (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai.

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap penyediaan informasi tentang tanggung jawab penggunaan biaya-biaya?
 - a. Sangat bagus
 - b. Cukup Bagus
 - c. Tidak bagus
 - d. Sangat tidak bagus
2. Bagaimanakah tingkat kemudahan akses informasi yang disediakan oleh pihak SMK Muhammadiyah Prambanan?
 - a. Sangat bagus
 - b. Cukup Bagus
 - c. Tidak bagus
 - d. Sangat tidak bagus
3. Apakah informasi yang disajikan sesuai dengan fakta dan analisis keputusan-keputusan kebijakan yang telah diambil?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup Sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
4. Bagaimana mekanisme pengaduan jika terdapat pelanggaran dalam penggunaan biaya pendidikan?
 - a. Sangat bagus
 - b. Cukup Bagus
 - c. Tidak bagus
 - d. Sangat tidak bagus

5. Bagaimanakah penyediaan informasi tentang tanggung jawab penggunaan biaya-biaya di SMK Muhammadiyah Prambanan?
 - a. Sangat bagus
 - b. Cukup Bagus
 - c. Tidak bagus
 - d. Sangat tidak bagus
6. Apakah sekolah melakukan upaya publikasi kebijakan publik melalui media massa?
 - a. Sangat mengupayakan
 - b. Cukup Mengupayakan
 - c. Tidak mengupayakan
 - d. Sangat tidak mengupayakan
7. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu tentang batasan waktu pelayanan mengenai penanganan keluhan-keluhan yang ada?
 - a. Sangat bagus
 - b. Cukup Bagus
 - c. Tidak bagus
 - d. Sangat tidak bagus
8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai informasi sekolah yang disajikan terkait dengan laporan kegiatan publik?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup Sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
9. Apakah sekolah melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam membuat sebuah kebijakan di sekolah?
 - a. Melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait
 - b. Melibatkan masyarakat saja
 - c. Melibatkan pihak-pihak terkait saja
 - d. Tidak melibatkan sama sekali

10. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintahan dalam meningkatkan arus informasi kebijakan sekolah?
- a. Menjalin kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintahan
 - b. Menjalin kerjasama dengan media massa saja
 - c. Menjalin kerja sama dengan lembaga non-pemerintahan saja
 - d. Tidak melibatkan sama sekali

Instrumen 2. Akuntabilitas

Petunjuk pengisian:

Dengan memberi tanda (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai.

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai standar pembuatan keputusan program sekolah SMK Muhammadiyah prambanan?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup Sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
2. Apakah sebuah keputusan tentang program sekolah yang ada tersedia bagi warga yang membutuhkannya?
 - a. Sangat tersedia
 - b. Cukup Tersedia
 - c. Tidak tersedia
 - d. Sangat tidak tersedia
3. Apakah keputusan mengenai program sekolah yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar ?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup Sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
4. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu tentang kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil berdasarkan visi dan misi sekolah?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup Sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai

5. Apakah penyajian informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program sudah akurat dan lengkap?
 - a. Sangat akurat dan lengkap
 - b. Cukup akurat dan lengkap
 - c. Tidak akurat dan lengkap
 - d. Sangat tidak akurat dan lengkap
6. Apakah sasaran kebijakan yang telah diambil sudah jelas?
 - a. Sangat jelas
 - b. Cukup Jelas
 - c. Tidak jelas
 - d. Sangat tidak jelas
7. Apakah kebijakan sebuah program sekolah yang telah diambil sudah tepat sasaran?
 - a. Sangat tepat sasaran
 - b. Cukup tepat sasaran
 - c. Tidak tepat sasaran
 - d. Sangat tidak tepat sasaran
8. Apakah produk-produk kebijakan yang dibuat oleh sekolah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
9. Apakah laporan pertanggungjawaban sekolah diinformasikan melalui media massa?
 - a. Sangat diinformasikan
 - b. Cukup diinformasikan
 - c. Tidak diinformasikan
 - d. Sangat tidak diinformasikan

10. Apakah sekolah memberikan laporan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak terkait (stakeholders)?
- a. Sangat memberikan laporan
 - b. Cukup memberikan laporan
 - c. Tidak memberikan laporan
 - d. Sangat tidak memberikan laporan
11. Apakah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sekolah sudah sesuai dengan keputusan dan mekanisme yang dibuat?
- a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
12. Apakah sekolah melakukan monitoring independen mengenai pengelolaan yang sudah berjalan?
- a. Sangat melakukan
 - b. Cukup melakukan
 - c. Tidak melakukan
 - d. Sangat tidak melakukan

Instrumen 3. Pengelolaan Dana Pendidikan

Petunjuk Pengisian:

Dengan memberi tanda (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai.

1. Apakah sekolah memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana?
 - a. Memiliki catatan sangat lengkap dan menyeluruh
 - b. Memiliki catatan cukup lengkap dan menyeluruh
 - c. Memiliki catatan tidak lengkap dan menyeluruh
 - d. Tidak memiliki catatan
2. Apakah sekolah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan yang tercantum pada buku kas keuangan sekolah?
 - a. Sangat memiliki
 - b. Cukup memiliki
 - c. Tidak memiliki
 - d. Sangat tidak memiliki
3. Apakah sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang tercantum pada buku kas umum sekolah?
 - a. Membelanjakan biaya sepenuhnya
 - b. Membelanjakan biaya separuhnya
 - c. Membelanjakan biaya kurang dari separuh
 - d. Tidak membelanjakan
4. Apakah gaji dan tunjangan lain yang dibayarkan bagi guru sesuai dengan sistem penggajian dan daftar penerimaan gaji?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai

5. Apakah gaji dan tunjangan lain yang dibayarkan bagi tenaga kependidikan sesuai dengan struktur dan sistem penggajian?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
6. Apakah biaya yang dibelanjakan oleh sekolah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan laporan keuangan?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
7. Apakah sekolah membelajarkan dana untuk kegiatan kesiswaan sesuai dengan laporan keuangan?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
8. Apakah biaya pengadaan alat tulis yang dibelanjakan oleh sekolah sesuai dengan laporan keuangan pengadaan alat tulis yang ada?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
9. Apakah biaya pengadaan bahan habis pakai yang dibelanjakan sekolah sesuai dengan alokasi dana yang dianggarkan sebelumnya?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai

10. Apakah biaya pengadaan alat habis pakai yang dibelanjakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi dana dan laporan keuangan yang ada?
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Tidak sesuai
 - Sangat tidak sesuai
11. Apakah kegiatan rapat yang dilakukan sekolah menggunakan dana sesuai dari anggaran yang suda ditetapkan?
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Tidak sesuai
 - Sangat tidak sesuai
12. Apakah biaya transport dan perjalanan dinas yang dibelanjakan sesuai dengan alokasi dana dan laporan keuangan yang ada?
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Tidak sesuai
 - Sangat tidak sesuai
13. Apakah biaya pengadaan soal-soal yang dibelanjakan oleh sekolah sesuai dengan alokasi dana dan laporan keuangan yang ada?
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Tidak sesuai
 - Sangat tidak sesuai
14. Apakah biaya daya dan jasa yang dibelanjakan oleh sekolah sesuai dengan alokasi dana dan laporan keuangan yang ada?
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Tidak sesuai
 - Sangat tidak sesuai

15. Apakah anggaran biaya kegiatan operasional dibelanjakan sesuai dengan laporan keuangan yang ada?
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Tidak sesuai
 - Sangat tidak sesuai
16. Apakah sekolah membelanjakan biaya untuk menunjang kegiatan sekolah?
- Sangat membelanjakan
 - Cukup membelanjakan
 - Tidak membelanjakan
 - Sangat tidak membelanjakan
17. Apakah sekolah menggunakan sumbangan pendidikan atau dari masyarakat untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas/Kanwil setempat?
- Sangat menggunakan
 - Cukup menggunakan
 - Tidak menggunakan
 - Sangat tidak menggunakan
18. Apakah sekolah menetapkan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa untuk mendapatkan keringanan biaya berdasarkan surat ketetapan kepala sekolah atau yayasan?
- Sangat mempertimbangkan
 - Cukup mempertimbangkan
 - Tidak mempertimbangkan
 - Sangat tidak mempertimbangkan
19. Apakah siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada awal tahun pelajaran sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Yayasan?
- Sangat dikenakan biaya pendaftaran ulang
 - Cukup dikenakan biaya pendafataran ulang
 - Tidak dikenakan biaya pendaftaran ulang
 - Sangat tidak dikenakan biaya pendaftaran ulang

20. Apakah sekolah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu secara ekonomi ?
- Sangat melaksanakan
 - Cukup melaksanakan
 - Tidak melaksanakan
 - Sangat tidak melaksanakan
21. Apakah sekolah melakukan pungutan biaya personal lain disamping uang sekolah?
- Sangat melakukan pungutan
 - Cukup melakukan pungutan
 - Tidak melakukan pungutan
 - Sangat tidak melakukan pungutan
22. Apakah pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan sesuai dengan hasil rapat?
- Sangat melibatkan berbagai pihak terkait dan sesuai dengan hasil rapat
 - Cukup melibatkan berbagai pihak terkait dan sesuai dengan hasil rapat
 - Tidak melibatkan berbagai pihak terkait dan tidak sesuai dengan hasil rapat
 - Sangat tidak melibatkan
23. Apakah pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan dana yang ada?
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Tidak sesuai
 - Sangat tidak sesuai

24. Apakah sekolah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan yang diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah?
- a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
25. Apakah sekolah memiliki Buku Kas Umum (BKU) dan diisi dengan benar?
- a. Sangat memiliki
 - b. Cukup memiliki
 - c. Tidak memiliki
 - d. Sangat tidak memiliki
26. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan?
- a. Sangat membuat dan menyampaikannya
 - b. Cukup membuat dan menyampaikannya
 - c. Tidak membuat dan menyampaikannya
 - d. Sangat tidak membuat sama sekali

Validasi Instrumen

PERNYATAAN JUDGEMENT

Setelah membaca instrumen dari penelitian yang berjudul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan" yang disusun oleh:

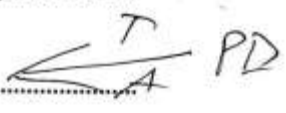
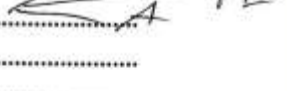
Nama : Tomi Viktoria
NIM : 08518244014
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Fakultas : Teknik- Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan ini saya :

Nama : Ketut Ima Ismara, M.Pd, M.Kes
NIP : 19610911 199001 1 001

Jabatan : Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro/ Lektor Kepala

Menyatakan bahwa instrumen tersebut telah / belum *) sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat sehingga instrumen layak / tidak layak *) digunakan untuk pengukuran dan saran untuk pembenahan:

1. Definisi operasional  PD
2. Kisi-kisi 
.....
.....
.....

*) coret yang tidak perlu



Sleman, 28 April 2014

Validator



Drs. Ketut Ima Ismara, M.Pd, M.Kes

NIP. 19610911 199001 1 001

Validasi Instrumen

PERNYATAAN JUDGEMENT

Setelah membaca instrumen dari penelitian yang berjudul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan" yang disusun oleh:

Nama : Tomi Viktoria
NIM : 08518244014
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Fakultas : Teknik- Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan ini saya :

Nama : Dr. Mujiyono, S.T., M.T., W.Eng
NIP : 19710515 199702 1 001
Jabatan : Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro/ Lektor Kepala

Menyatakan bahwa instrumen tersebut telah / ~~belum~~*) sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat sehingga instrumen layak / ~~tidak layak~~*) digunakan untuk pengukuran dan saran untuk pembenahan:

.....
.....
.....
.....
.....

*) coret yang tidak perlu

Sleman, 28 April 2014

Validator



Dr. Mujiyono, S.T., M.T., W.Eng

NIP. 19710515 199702 1 001

Data Instrumen Transparansi

No Item	No Responden										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
2	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	31
3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	23
4	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	26
5	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	36
6	4	2	2	4	4	3	2	2	4	3	30
7	3	3	3	2	4	2	3	3	3	2	28
8	2	4	3	2	3	3	3	3	4	2	29
9	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	31
10	3	3	4	4	3	2	3	3	2	2	29

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Transparansi	10	23.00	39.00	302.00	30.2000	4.58984	21.067	.598	.687	.655	1.334
Valid N (listwise)	10										

Data Instrumen Akuntabilitas

No Item	No Responden												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	44
2	4	3	4	3	2	4	3	4	3	3	4	3	40
3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	42
4	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	35
5	3	3	3	3	3	2	4	3	4	4	2	3	37
6	3	4	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	36
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	38
8	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	37
9	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	38
10	3	4	3	2	3	3	4	3	4	4	4	3	40

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Akuntabilitas Valid N (listwise)	10	35.00	44.00	387.00	38.7000	2.79086	7.789	.692	.687	-.126	1.334

Data Instrumen Pengelolaan Dana Pendidikan

No Item	No Responden																										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	94
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	2	4	3	3	3	3	4	4	84
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	85
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	77
5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	2	4	4	3	2	3	2	3	4	3	4	4	88
6	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	4	75
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	79
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	76
9	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	80
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	4	80

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Peng.dana	10	75.00	94.00	818.00	81.8000	5.95912	35.511	.948	.687	.445	1.334
Valid N (listwise)	10										

Wawancara Transparansi

Pertanyaan:

Bagaimana sekolah menyediakan informasi terkait pengelolaan dana di sekolah?

Jawaban:

Sekolah menyediakan informasi dimulai dari awal tahun dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S) yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap kegiatan pendidikan di sekolah dan selalu membuat laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir tahun.

Pertanyaan:

Apakah pihak sekolah memberikan kemudahan akses kepada pihak-pihak terkait tentang pengelolaan dana di sekolah?

Jawaban:

Sebetulnya tidak masalah akan tetapi setiap dana yang ada tidak langsung terserap atau masuk ke dalam kas. Hanya pengendalian saja bukan untuk mempersulit. Pengendalian yang dilakukan oleh sekolah merupakan langkah perimbangan keuangan sekolah yang ada.

Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme pengaduan yang dibuat oleh sekolah jika terdapat sebuah pelanggaran?

Jawaban:

Langsung atau melalui teguran jika terdapat suatu pelanggaran.

Pertanyaan:

Apakah pihak sekolah menjalin kerja sama dengan media massa dalam meningkatkan informasi?

Jawaban:

Iya, sekolah selalu melakukan kerja sama dengan media massa dalam meningkatkan informasi diantaranya adalah kedaulatan rakyat, suara muhammadiyah, radio, baliho, dan lain-lain.

Wawancara akuntabilitas**Pertanyaan:**

Bagaimana sekolah membuat laporan penggunaan dana?

Jawaban:

Sekolah membuat laporan penggunaan dana dalam bentuk buku laporan keuangan yang sebelumnya di analisis oleh seorang akuntan dan dilakukan setiap tahun ajaran berlangsung. Dipergunakannya seorang akuntan adalah untuk memudahkan dan mengetahui neraca keuangan dalam penggunaan dana pendidikan di sekolah. Dengan demikian akan lebih mudah diketahui, apakah penggunaan dana pendidikan sudah efektif atau belum efektif.

Pertanyaan:

Apakah setiap pengeluaran pembiayaan sekolah harus disertai dengan bukti?

Jawaban:

Iya, setiap pengeluaran harus disertai dengan bukti keuangan. Jika bukti keuangan dibuat sendiri harus disertakan tanda tangan dan diketahui minimal 2 orang kemudian diserahkan kepada bendahara. Jika bukti keuangan berupa nota dari toko Kepala Sekolah wajib mengetahui dan menandatangani.

Pertanyaan:

Apakah setiap pengeluaran pembiayaan pendidikan dicatat dalam buku kas sekolah?

Jawaban:

Iya, setiap pengeluaran biaya pendidikan dalam bentuk apapun baik besar maupun kecil selalu dicatat dalam buku kas pembiayaan sekolah.

Pertanyaan:

Bagaimanakah bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan?

Jawaban:

Bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan semuanya dituliskan di dalam buku laporan keuangan. Semua komponen biaya maupun pembiayaan terdapat di dalam buku laporan tersebut meskipun besaran biaya-biaya yang ada tidak dituliskan secara rinci hanya dituliskan secara garis besarnya saja.

Wawancara Pengelolaan Dana Pendidikan**Pertanyaan:**

Bagaimanakah pengelolaan dana pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan?

Jawaban:

Pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan program-program yang dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S). Setiap pengeluaran dana pendidikan sudah disesuaikan dalam anggaran untuk masing-masing kegiatan pendidikan. Akan tetapi untuk besaran dana yang dikeluarkan tidak sepenuhnya tercukupi, hanya 85% saja dan sisanya sebesar 15% digunakan sebagai uang atau angka keamanan untuk kebutuhan lainnya.

Pertanyaan:

Apa peran Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan?

Jawaban:

Sebagai pegendali atau pengawasan pengelolaan dana pendidikan agar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S) yang sudah dibuat. Namun dalam kebijakan ini kepala sekolah selalu bekerja sama dengan bendahara untuk memutuskan suatu kebijakan penggunaan dana di sekolah.

Pertanyaan:

Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RAPBS?

Jawaban:

Semua pihak yang terkait dengan pendidikan ikut dilibatkan dalam penyusunan RAPBS, baik dari pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah diantaranya: bendahara; kepala sekolah, wakil kepala sekolah; waka (sarana dan prasarana, kesiswaan, kurikulum, dan humas) kaprodi (mesin, elind, otomotif, TKJ) dan komite sekolah.

Pertanyaan:

Apakah guru ikut terlibat dalam penyusunan RAPBS?

Jawaban:

Dalam penyusunan RAPBS guru tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan oleh pihak waka. Jika melibatkan semua guru yang ada maka waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk menyusun RAPBS bahkan tidak akan selesai. Selain itu akan terlalu banyak perbedaan pendapat yang muncul, padahal anggaran yang sudah ada harus berjalan dan digunakan.

Pertanyaan:

Darimana sajakah pemasukan dana pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan?

Jawaban:

Pemasukan dana pendidikan berasal dari berbagai sumber diantaranya: APBN, APBD, komite sekolah, APBDP (dana bantuan), dan unit produksi. Dari berbagai sumber dana tersebut, pemasukan yang terbesar berasal dari komite sekolah sedangkan untuk unit produksi meskipun tidak terlalu besar tetapi memberikan nilai tambahan pemasukan dana untuk sekolah. Untuk sumber dana yang berasal dari bantuan besaran yang diperoleh tidak dapat ditentukan atau tidak pasti, ini dikarenakan banyak pihak-pihak yang secara bersama-sama mengajukan dana bantuan pendidikan, sehingga jumlah besaran dana dan sekolah mana yang akan mendapatkannya belum pasti.

Pertanyaan:

Apakah bagian keuangan melaporkan keuangan kepada kepala sekolah?

Jawaban:

Iya, bagian keuangan selalu melaporkan keuangan setiap 2 (dua) minggu sekali dalam bentuk buku laporan keuangan. Dalam laporan tersebut akan diketahui berapa besar dana yang masuk dan berapa besar dana yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Selain itu setiap bulan dan setiap semester laporan keuangan juga akan dilaporkan, dengan itu jika masih terdapat kekurangan dana atau siswa yang dikatakan belum membayar maka setiap orang tua/ wali murid masing-masing siswa akan diberitahu jika masih memiliki tunggakan pembayaran.

Pertanyaan:

Kepada siapa saja laporan pengelolaan dana pendidikan disampaikan?

Jawaban:

Laporan pengelolaan dana pendidikan disampaikan kepada pihak pimpinan muhammadiyah tingkat wilayah/provinsi, pimpinan muhammadiyah tingkat daerah/kabupaten, dan pimpinan yayasan sekolah.

Pertanyaan:

Apakah bapak pernah memeriksa kas bagian keuangan?

Jawaban:

Sebelum saya memeriksa, kas bagian keuangan sudah melaporkan kepada kepala sekolah sehingga saya tinggal menandatangani saja. Dengan kata lain kepala sekolah tidak selalu memeriksa meskipun terkadang kepala sekolah sendiri yang memeriksa secara langsung.

Perhitungan Nilai Rata-rata Ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi)

1. Transparansi

Skor Tertinggi = Jumlah butir angket x skor tertinggi angket = $10 \times 4 = 40$

Skor Terendah = 10

a. $M_i = \frac{1}{2} (\text{Nilai tertinggi} + \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{2} (40+10) = 25$

b. $SD_i = \frac{1}{6} (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{6} (40-10) = 5$

Batasan-batasan kategori kecenderungan variabel transparansi :

a. Rendah $= SR \text{ s.d } (M_i - 1,5 SD_i)$

$$= 10 \text{ s.d } (25 - 1,5 \times 5)$$

$$= 10 \text{ s.d } 17,5$$

b. Kurang $= (M_i - 1,5 SD_i) - (M_i + 0,0 SD_i)$

$$= (25 - 1,5 \times 5) - (25 + 0,0 \times 5)$$

$$= 17,5 \text{ s.d } 25$$

c. Cukup $= (M_i + 0,0 SD_i) - (M_i + 1,5 SD_i)$

$$= (25 + 0,0 \times 5) - (25 + 1,5 \times 5)$$

$$= 25 \text{ s.d } 32,5$$

d. Tinggi $= (M_i + 1,5 SD_i) - ST$

$$= (25 + 1,5 \times 5) - 40$$

$$= 32,5 \text{ s.d } 40$$

2. Akuntabilitas

Skor Tertinggi = jumlah butir angket x skor tertinggi angket = $12 \times 4 = 48$

Skor Terendah = 12

Batasan-batasan kategori kecenderungan variabel akuntabilitas

$$M_i = \frac{1}{2} (\text{Nilai tertinggi} + \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{2} (48 + 12) = 30$$

$$SD_i = \frac{1}{6} (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{6} (48 - 12) = 6$$

- a. Rendah = SR s.d ($M_i - 1,5 SD_i$)
 = 12 s.d ($30 - 1,5 \times 6$)
 = 12 s.d 21
- b. Kurang = ($M_i - 1,5 SD_i$) – ($M_i + 0,0 SD_i$)
 = ($30 - 1,5 \times 6$) – ($30 + 0,0 \times 6$)
 = 21 s.d 30
- c. Cukup = ($M_i + 0,0 SD_i$) – ($M_i + 1,5 SD_i$)
 = ($30 + 0,0 \times 6$) – ($30 + 1,5 \times 6$)
 = 30 s.d 39
- d. Tinggi = ($M_i + 1,5 SD_i$) – ST
 = ($30 + 1,5 \times 6$) – 48
 = 39 s.d 48

3. Pengelolaan Dana Pendidikan

Skor Tertinggi = jumlah butir angket x skor tertinggi angket = $26 \times 4 = 104$

Skor Terendah = 26

Batasan-batasan kategori kecenderungan variabel akuntabilitas

$$Mi = \frac{1}{2} (\text{Nilai tertinggi} + \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{2} (104 + 26) = 65$$

$$SDi = \frac{1}{6} (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{6} (104 - 26) = 13$$

e. Rendah = SR s.d $(Mi - 1,5 SDi)$

$$= 26 \text{ s.d } (65 - 1,5 \times 13)$$

$$= 26 \text{ s.d } 45,5$$

f. Kurang = $(Mi - 1,5 SDi) - (Mi + 0,0 SDi)$

$$= (65 - 1,5 \times 13) - (65 + 0,0 \times 13)$$

$$= 45,5 \text{ s.d } 65$$

g. Cukup = $(Mi + 0,0 SDi) - (Mi + 1,5 SDi)$

$$= (65 + 0,0 \times 13) - (65 + 1,5 \times 13)$$

$$= 65 \text{ s.d } 84,5$$

h. Tinggi = $(Mi + 1,5 SDi) - ST$

$$= (65 + 1,5 \times 13) - 104$$

$$= 84,5 \text{ s.d } 104$$

Perhitungan Data Penelitian

1. Hasil Analisis Kriteria Transparansi

Statistics		
Transparansi		
N	Valid	10
	Missing	0
Mean		3.10
Median		3.00
Mode		3
Std. Deviation		.568
Sum		31

Transparansi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	1	10.0	10.0	10.0
	Cukup	7	70.0	70.0	80.0
	Tinggi	2	20.0	20.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

2. Hasil Analisis Kriteria Akuntabilitas

Statistics		
akuntabilitas		
N	Valid	10
	Missing	0
Mean		38.7000
Median		38.0000
Mode		37.00 ^a
Std. Deviation		2.79086
Sum		387.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown		

akuntabilitas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	6	60.0	60.0	60.0
	tinggi	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

3. Hasil Analisis Kriteria Pengelolaan Dana Pendidikan

Statistics		
Peng_dana		
N	Valid	10
	Missing	0
Mean		81.8000
Median		80.0000
Mode		80.00
Std. Deviation		5.95912
Sum		818.00

pengelolaan_dana					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	7	70.0	70.0	70.0
	tinggi	3	30.0	30.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Surat Ijin Penelitian

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
NOMOR : 01/MEKA/TA-S1/I/2014

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI S1
BAGI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, perlu diangkat pembimbing.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI : Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : a. Nomor 93 Tahun 1999 ; b. Nomor 305 M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor : 1160/UN34/KP/2011
- Mengingat pula : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 483/J.15/KP/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Pembimbing Tugas Akhir Skripsi bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :

Ketua / Pembimbing I : Soeharto, Ed.D
Bagi mahasiswa :
Nama/No. Mahasiswa : **Tomi Viktoria/08518244014**
Jurusan/Prodi : Pend. Teknik Mekatronika S-1
Judul Tugas Akhir Skripsi : *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan*

- Kedua : Dosen pembimbing disertai tugas membimbing penulisan Tugas Akhir Skripsi sesuai dengan pedoman Tugas Akhir Skripsi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2014
Dekan



Moch. Bruri Triyono
NIP. 19580216 198603 1 003

- Tembusan Yth :
1. Pembantu Dekan II FT UNY
 2. Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro
 3. Kasub. Bag. Pendidikan FT UNY
 4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psu. 276,289,292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734
website : <http://ft.uny.ac.id> e-mail: ft@uny.ac.id ; teknik@uny.ac.id

23/01/2014 16:34:00



Certificate No. QSC 80592

Nomor : 684/UN34.15/PL/2014
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

27 Februari 2014

Yth.

1. Gubernur Provinsi DIY c.q. Ka. Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY
2. Gubernur Provinsi DIY c.q. Ka. Badan KESBANGLINMAS Propinsi DIY
3. Bupati Sleman c.q. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY
5. SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN, JL. PRAMBANAN, PIYUNGAN KM. 1, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan"** bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	Jurusan/Prodi	Lokasi Penelitian
1	Tomi Viktoria	08518244014	Pendidikan Teknik Mekatronika	SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN, SLEMAN YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu : Soeharto, Ed. D.
NIP : 19530825 197903 1 003

Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan selesai.
Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kerjasama yang baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih.



Dekan,
D. B. Wakil Dekan I,

Dr. Sunaryo Soenarto
NIP 19580630 198601 1 001

Tembusan:
Ketua Jurusan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

0901022@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/7.3/2014

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS TEKNIK** Nomor : **684/UN34.15/PL/2014**
Tanggal : **27 FEBRUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Penzinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **TOMI VIKTORIA** NIP/NIM : **08518244014**
Alamat : **FAKULTAS TEKNIK, PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Judul : **PENGARUH TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN**
Lokasi : **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY**
Waktu : **3 MARET 2014 s.d 3 JUNI 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **3 MARET 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Ub,
Kantor Administrasi Pembangunan



Tembusan

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY
4. DEKAN FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN
SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN
KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
STATUS : TERAKREDITASI A



Alamat : Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta 55572 Telp. 0274-496170, Fax. 0274-497990
Website <http://www.smkmuhprambanan.net> Email : pos@smkmuhprambanan.net

SURAT IZIN PENELITIAN

No : 6587.1/KET/III.4.AU/F/III/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama	: Drs. H. Anton Subiyantoro, M.M.
2. NIP	: 19560716 198603 1 006
3. Pangkat/Golongan	: Pembina, IV/a
4. Jabatan	: Kepala sekolah
5. Unit Kerja	: SMK Muhammadiyah Prambanan

Dengan ini memberikan ijin kepada saudara :

1. Nama	: TOMI VIKTORIA
2. Nomor Induk Mahasiswa	: 08518244014
3. Program / Tingkat	: S1
4. Jurusan	: Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta
5. Untuk	: Mengadakan Penelitian dengan judul : " PENGARUH TRANSPARASI DAN AKUTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN "
6. Waktu Pelaksanaan	: 3 Maret – 3 Juni 2014

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prambanan, 5 Maret 2014

Kepala Sekolah

Drs. Anton Subiyantoro, M.M.
Pembina, IV/a
NIP. 19560716 198603 1 006

A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL *)

*) Lingkari yang dipilih

Nomor : 070/004

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama | : Tomy Victoria |
| 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM | : 08510244014 |
| 3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) | : S1 |
| 4. Universitas/Akademi | : UNX |
| 5. Dosen Pembimbing | : Soeharto, Ed.D |
| 6. Alamat Rumah Peneliti | : Jl. Afendi No. 55 Gedung -
Catur |
| 7. Nomor Telepon/HP | : 085743240140 |
| 8. Lokasi Penelitian/Survey | : 1. Smtk Muhammadiyah Pramboran
2. |
| 9. Judul Penelitian | : |

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Pendidikan

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.



Sleman, 3 Maret 2014
Yang menyatakan

Tomy Victoria
(nama terang)

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 804 / 2014

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/780/2014
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 03 Maret 2014

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : TOMI VIKTORIA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 08518244014
Program/Tingkat : SI
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Karangmalang, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Afandi, Condongcatur, Depok, Sleman
No. Telp / HP : 085743240140
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PENGARUH TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI SMK MUHAMMADIYAH
PRAMBANAN**
Lokasi : SMK Muhammadiyah Prambanan
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 03 Maret 2014 s/d 03 Juni 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman
4. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Prambanan
6. Ka. SMK Muhammadiyah Prambanan
7. Dekan Fak. Teknik - UNY
8. Yang Bersangkutan

Dikeluarkan di Sleman

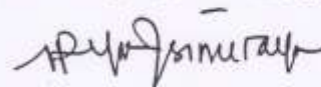
Pada Tanggal : 3 Maret 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM
Pembina, IV/a
NIP 19630112 198903 2 003